

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Santoso, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Anthon Raharusun, 2014, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam Periode 1950-2012*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Uniska Press, Bandung.

Fahmi Amrusyi, 1987, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.

Frans Pekey, 2018 *Otonomi Khusus Papua: Dinamika Formulasi Kebijakan Semu*, Kompas, Jakarta

Kholilullah Pasaribu, 2016, *Noken dan Konflik Pemilu*, Perludem, Jakarta

Maria SW. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, tanpa penerbit, Yogyakarta.

Moh Mahfud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moh Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet 6, Rajawali Pers, Jakarta

Ni'matul Huda, 2010, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung

Pares L Wenda, Yoka Yoman, Nikak Kogoya, 2013, *Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tidak Demokratis*, Lembaga Intelektual Tanah Papua, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## JURNAL

Abdus Salam, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Mazahib:*

*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015

Arie Januar, Fungsi, Makna, Dan Eksistensi Noken Sebagai Simbol Identitas Orang

Papua, *Patrawidya*, Vol .18, No. 1, April 2017

Cahyo Pamungkas, Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang

Kaimana Pada Masa Trikora Dan Pepera, *Paramita*, Vol. 25, No. 1,

Januari 2015

Eddy Asnawi, “Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam

Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol.

3, Nomor 1, Tahun 2003

Elisabeth Lenny Marit, Noken Dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender dan

Ideologi, *MALENESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa*, Volume

01, No. 01, Agustus 2016

Gunawan A. Tauda, Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1,

Edisi 4, Nov 2018

Harto Bernabas Berty Sawen, Pamerdi Giri Wiloso, dan Elly E. Kudubun, “Bendera

Merah Putih Dalam Ararem: Studi Sosiologis Tentang Makna Simbolik

Bendera Merah Putih dalam Upacara Pembayaran Mas kawin pada Masyarakat Desa Ambroben, Distrik Biak Kota”, *Cakrawala*, Vol. 5, No, 1, 2016

Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Legislasi Indoneisa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2015

Muhammad Ridwansyah, Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

Nelwan Ronsumbre, Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 5, No. 2. 2019

Rochendi S, “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat”, *Jurnal Politik*, Vol.13, No.1, 2017

Yance Arizona, Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, Volume III, No. 1, Juni 2010.

## INTERNET

CNN: *Sebanyak 2, 21 Juta Warga Papua Belum Rekam Data e-KTP,*

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160831133441-20-155099/sebanyak-221-juta-warga-papua-belum-rekam-data-e-ktp/>,

Jubi.co.id: *Kenapa otsus ditolak, lalu orang Papua minta merdeka?*

<https://jubi.co.id/kenapa-otsus-ditolak-lalu-orang-papua-minta-merdeka/>,

Jubi.co.id: *Pemilu yang berkualitas dan sistem noken di Papua,*

<https://jubi.co.id/pemilu-yang-berkualitas-dan-sistem-noken-di-papua/>

Kominfo: *Kantor bupati Jayawijaya dibakar oleh masa aksi Penolakan Otonomi*

*Khusus Jilid II,*

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/29791/disinformasi-kantor-bupati-jayawijaya-dibakar-oleh-masa-aksi-penolakan-otonomi-khusus-jilid-ii/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29791/disinformasi-kantor-bupati-jayawijaya-dibakar-oleh-masa-aksi-penolakan-otonomi-khusus-jilid-ii/0/laporan_isu_hoaks)

Kompas.com: *Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut*

*Rakyat Papua.*

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/05/11542491/peneliti-lipi-uu-otsus-berhasil-bagi-pemerintah-gagal-menurut-rakyat-papua>

Koran.tempo.co: *Pemilihan Gubernur Papua bakal Tertundah,*

<https://koran.tempo.co/read/nusa/273732/pemilihan-gubernur-papua-bakal-tertunda>

Majelis Rakyat Papua, *Sejarah Hadirnya MRP.* [http://mrp.papua.go.id/sejarah-](http://mrp.papua.go.id/sejarah-hadirnya-mrp/)

[hadirnya-mrp/](http://mrp.papua.go.id/sejarah-hadirnya-mrp/), *Op.Cit*

Media Indonesia: RUU Otsus Papua Jadi Prolegnas Prioritas,

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/285227/ruu-otsus-papua-jadi-prolegnas-prioritas>

Perludem: Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik,

<http://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-picu-konflik/>

www.papua.go.id: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), [https://dpr-](https://dpr-papua.go.id/profil/sejarah-dpr-papua/)

[papua.go.id/profil/sejarah-dpr-papua/](https://dpr-papua.go.id/profil/sejarah-dpr-papua/)

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Suer Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

- Undang-Undang No. 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PHPU.D-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/81/PHPU.A/VII/2009
- Perdasus No. 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- PKPU No. 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat
- Keputusan KPU Provinsi Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.03/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem Noken
- Resolusi No. 2504 on Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)